



	Penataan Malioboro Wajib Libatkan Semua Pelaku Usaha					
TAJUK	<p>Pemkot Jogja bersama Pemda DIY terus berupaya menata kawasan Malioboro sebagai magnet dan etalase pariwisata di DIY, khususnya di Kota Jogja. Salah satunya adalah relokasi pedagang kaki lima yang kali ini sudah memasuki jilid kedua. Rencananya, Pemda DIY akan merelokasi lokasi, yakni di belakang Ramayana Ketandan dan samping Teras Malioboro 1. Saat ini, penyiapan</p>	<p>relokasi itu masih pada tahap penyusunan <i>detail engineering design</i>. Seperti yang telah diduga sebelumnya, upaya pemerintah ini bakal mendapatkan respons negatif dari para pedagang. Salah satunya adalah terkait dengan tak dilibatkannya pedagang dalam proses pembahasan relokasi tersebut. Padahal keterlibatan pedagang sebagai pihak yang direlokasi wajib dipertimbangkan oleh pemerintah. Setidaknya, berkaca dari pengalaman</p>	<p>saat relokasi jilid pertama lalu, banyak timbul pro dan kontra. Selain itu, keterlibatan pedagang Teras Malioboro 2 dalam pembahasan rencana relokasi perlu ada agar kekhawatiran pedagang bisa terjawab. Mereka khawatir jika relokasi dilakukan secara sepihak, lokasi baru nantinya tak sesuai dengan mereka harapkan. Dalam upaya penataan kawasan Malioboro, pemerintah seharusnya memang jangan sampai bertindak secara sepihak. Pasalnya, kedatangan wisatawan tak cuma jadi</p>	<p>momentum pemerintah mendulang pendapatan asli daerah, tetapi lebih dari itu, kunjungan wisatawan diharapkan bisa pula menggeliatkan perekonomian masyarakat. Jika hanya mengedepankan ketertiban dan keindahan Malioboro tanpa mengindahkan nasib perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari wisata Malioboro, maka spirit penataan kawasan itu pun bisa dibilang gagal. Jadi, sudah seharusnya</p>	<p>pemerintah merefleksikan kembali dengan sebuah pertanyaan, sebenarnya penataan kawasan Malioboro itu diperuntukkan bagi siapa dan untuk apa? Meski begitu, pemerintah juga harus cermat dalam mengakomodasi setiap pendapat dari pedagang. Jangan sampai aspirasi pedagang yang hanya dilatarbelakangi oleh keinginan mereka meraup omzet sebesar-besarnya semata menjadi penghalang bagi rencana penataan kawasan tersebut.</p>	<p>Selain itu pemerintah juga jangan hanya berfokus pada penataan PKL, tetapi juga para pelaku usaha lainnya di Malioboro. Seperti misalnya andong dan betor yang selama ini juga banyak dikeluhkan oleh wisatawan dan pengguna jalan. Dengan konsep penataan yang menyeluruh, diharapkan kawasan Malioboro pun tak hanya menjadi surga bagi wisatawan, tetapi juga ladang rupiah bagi masyarakat yang sehari-harinya mengais rezeki di sana.</p>

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005